

Relevansi Etika Politik Peter Ludwig Berger bagi Pembangunan Pariwisata Premium di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur

Heribertus Solosumanthro

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
sumantroatro@gmail.com

ABSTRACT

The history of development in a reality of human life occupies a space and context of fundamental change. The space and context of change absorb the paradoxical dimensions of human life. Accommodation of interests that dominate position, authority, collective policies, and development values also reduce the identity of development. This can be seen in the development of tourism in the premium city of Labuan Bajo. This paper aims to explain the political ethics of development as a concrete step in seeing, reflecting, and making decisions about the collective development of a society. A review of political ethics in development is an effort to understand the reality of injustice and discrimination of the morality of the rights of poor and oppressed minority communities. The results and discussion show that the reality of people's lives that live in the collective imagination of building the world of tourism development in Labuan Bajo also invites critical analytical reviews in the idealism of political development. Two main points found that as far as the concept of calculus of pain and calculus of meaning inhabits a political ethics of development, society gets an invitation to be involved in critical analysis and ethical sensitivity of collective development. Peter L. Berger is sees that to become a whole human being certainly requires reflection as well as action.

Keywords: Political ethics, Berger, Development, calculus of pain, calculus of meaning, Labuan Bajo.

ABSTRAK

Sejarah pembangunan dalam suatu realitas kehidupan manusia menempati ruang dan konteks perubahan yang fundamental. Ruang dan konteks perubahan itu menyerap dimensi-dimensi kehidupan manusia yang paradoksal. Akomodasi kepentingan-kepentingan yang menguasai kedudukan, wewenang, kebijakan kolektif, dan nilai pembangunan turut mereduksi identitas pembangunan. Hal ini terlihat dalam pembangunan pariwisata kota premium Labuan Bajo. Tulisan ini hendak menjelaskan etika politik pembangunan sebagai langkah konkret dalam melihat, merefleksikan, dan mengambil keputusan pembangunan kolektif suatu masyarakat. Tinjauan etika politik dalam pembangunan adalah usaha memahami realitas ketidakadilan dan diskriminasi moralitas hak-hak minoritas masyarakat miskin dan tertindas. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa realitas kehidupan masyarakat yang tinggal dalam imajinasi kolektif membangun dunia pembangunan pariwisata di Labuan Bajo juga mengundang tinjauan kritis analitis dalam idealisme politik pembangunan. Dua poin utama yang ditemukan bahwa sejauh konsep calculus of pain dan calculus of meaning mendiami suatu etika politik pembangunan, masyarakat mendapatkan undangan keterlibatan dalam analisis kritis dan kepekaan etis suatu pembangunan kolektif. Peter L. Berger berpandangan bahwa untuk menjadi manusia seutuhnya tentunya membutuhkan refleksi sekaligus tindakan.

Kata Kunci: Etika politik, Berger, pembangunan, calculus of pain, calculus of meaning, Labuan Bajo.

PENDAHULUAN

Kemajuan perkembangan peradaban kehidupan manusia yang amat kompleks pada era modern saat ini mendefinisikan suatu pembangunan yang menjadi cikal bakal lahirnya identitas baru politik hidup manusia. Pasalnya, term pembangunan dalam pola pikir manusia menghasilkan suatu transformasi pikiran yang bercabang. Dalam konteks ini, pembangunan sebagai identitas suatu bangsa tidak hanya menekankan

suatu pembangunan fisik, tetapi juga moral suatu bangsa. Pertama, pembangunan dinilai sebagai daya transformatif yang menghasilkan suatu konsep wawasan berkelanjutan yang konstruktif. Pembangunan menghasilkan suatu tinjauan perubahan yang kontekstual dengan kebutuhan hidup manusia di setiap perkembangan zamannya. Manusia yang sadar konteks pembangunan akan membaca suatu perubahan sebagai peluang untuk meninjau kemajuan di masa yang mendatang. Kedua, pembangunan dinilai sebagai

masalah yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan elite politik dalam suatu prinsip menguasai kedudukan, posisi, jabatan, wewenang tanpa moralitas kemanusiaan di dalamnya (Renwarin, 2006). Pembangunan menjadi salah penyebab substansi ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat global. Dalam konteks pembangunan, manusia sering kali mengatasnamakan kepentingan komunal demi kesejahteraan individual.

Membaca Arief Budiman dalam Menrawin (2006) dijelaskan bahwa pembangunan mempunyai dua unsur pokok, yaitu masalah materi yang mau dihasilkan dan masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif sebagai pembangun. Korelasi manusia dan materi dalam pembangunan dilihat sebagai upaya memahami cara menciptakan kondisi lingkungan, baik lingkungan politik dan sosial budaya yang dapat mendorong lahirnya manusia kreatif, termasuk proses-proses yang memungkinkan terjadinya manusia kreatif (Renwarin, 2006). Hemat penulis, keseimbangan materi dengan kualitas manusia adalah dua hal yang mesti berjalan berdampingan atau satu kesatuan.

Meskipun demikian, kreativitas manusia sebagai jalan keluar pembangunan yang luas juga menautkan problematika kemajuan pembangunan yang paradoksal. Peter L. Berger mendefinisikan pembangunan dalam cakupan yang luas sebagai suatu proses yang menyebabkan sebuah negara miskin menjadi kaya atau proses yang menjadikan sebuah negara kaya semakin kaya. Terdapat tiga konstruksi pemikiran yang pro terhadap ini. Pertama, Berger melihat bahwa pembangunan menjadi masalah bagi mereka yang membuat kebijakan politik umum di setiap negara. Kedua, Berger melihat pembangunan juga merupakan masalah bagi para teoritis atau ilmuwan yang pekerjaan pokoknya berpikir ketimbang berbuat. Ketiga, pembangunan dilihatnya sebagai masalah bagi sebagian besar masyarakat biasa, khususnya di negara-negara miskin (Renwarin, 2006). Degradasi pembangunan terletak pada sikap dan perilaku manusia terhadap nilai dan pembangunan yang ada di dalamnya. Manusia itu akan terus bertumbuh dalam kekerdilan daya konstruktif budaya yang semakin tergerus oleh kekayaan intelektual yang ditempatkan tidak pada porsi atau tempatnya sendiri.

Membaca realitas situasi sosial-politik Indonesia saat ini, pembangunan infrastruktur di setiap wilayah menjadi tolak ukur berkembang dan majunya suatu negara. Papua yang dinilai terbelakang akan menjadi wilayah yang maju tatkala pembangunan fisiknya terukur dan megah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa meningkatnya dana otonomi khusus Provinsi Papua yang mencakup dana pendidikan, kesehatan dan dana infrastruktur tambahan (DIT) tidak mengimbangi kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini terlihat dalam

perolehan dana tahun 2002-2020 mencapai Rp. 93,05 triliun dan dana tambahan infrastruktur mencapai Rp. 93,05 triliun, tetapi masih masuk dalam kategori indeks pembangunan manusia (IPM) terendah (Hasibuan, 2001). Definisi pembangunan yang tanpa batasan yang jelas semacam ini tentunya akan mereduksi nilai sebuah etika politik dalam pembangunan suatu daerah. Indonesia adalah negara yang sukar menempatkan diri dalam pengambilan keputusan atas dasar moral suatu pembangunan. Hal itu akan berdampak lanjut pada penurunan spirit generasi muda dalam membaca definisi pembangunan yang berakar dalam praktik nyata dalam lingkungan sosial-politik masyarakat umum.

Selain Papua, Labuan Bajo yang menjadi sentral destinasi wisata di Indonesia akhir-akhir ini menempatkan konsep pembangunan dalam skala yang luas dan memadai. Pemerintah sebagai fasilitator utama pembangunan cenderung menempatkan diri dalam lingkaran kepentingan yang ambisius, egoistis dan arogan. Kenaikan tarif tiket masuk ke Pulau Komodo yang mencapai 3,75 juta tanpa pertimbangan dan dialog terlebih dahulu adalah suatu keputusan pembangunan tanpa akomodasi aspirasi masyarakat (Herin, 2002). Selain itu, pengalihan hutan Bowosie untuk kepentingan pemerintah yang telah turut mendiskriminasikan hak-hak rakyat menjadi ulsan pembangunan yang kurang memperhatikan etika dan situasi masyarakat dalam kubangan kapitalisme (Herin, 2002). Hutan Bowosie yang memiliki sebelas mata air untuk keperluan pengairan dan air bersih bagi berbagai wilayah termasuk memasok 65 persen kebutuhan air bersih bagi warga di Kota Labuan Bajo telah dialihkan oleh pemerintah untuk hanya untuk perluasan zona hiburan, rekreasi dan petualangan. Kebijakan ini tentunya menciderai hak prioritas masyarakat lokal untuk mendapatkan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Lantas, apakah Pemerintah sebagai representasi masyarakat umum tak perlu belajar etika politik dalam mengambil kebijakan atas kepentingan bersama? Apakah sikap otoritas Pemerintah dalam memperketat kebijakan umum dan khusus berdasarkan pertimbangan moral hidup Bangsa Indonesia? Atau sebaliknya, Bagaimanakah seharusnya Pemerintah dan masyarakat menempatkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang merepresentasikan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Labuan Bajo pada khususnya?

Pertanyaan-pertanyaan retorik di atas memberikan permenungan reflektif yang mengakar akan adanya kombinasi kajian kritis suatu etika politik dalam pembangunan suatu wilayah dan praktis pembangunan yang idealis di mata masyarakat. Sebab, Peter L. Berger dalam politik pembangunannya juga berpaut pada dua tesis utama. Pertama, politik pembangunan harus memperhitungkan penderitaan

(*calculus of pain*) dalam setiap kebijakan politik. Kedua, pembangunan pertama-tama adalah masalah politik yang menghendaki nilai-nilai tertentu. Bagi Berger pembangunan merupakan gabungan antara pengetahuan atau analisa kritis dan “kepekaan etis” (Daven, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel adalah metode studi kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis isi (*content analysis*). Weber dalam Jumal Ahmad menjelaskan analisis isi sebagai sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks (Ahmad, 2018). Pertama, penulis akan merumuskan konsep etika politik Peter Berger dan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai sumber data yang utama dalam membahas konsep etika politik Peter L. Berger. Sumber utama yang digunakan penulis adalah *Pyramids of Sacrifice Political Ethics and Social Change*. Kedua, Penulis akan membahas pariwisata di Labuan Bajo. Sumber utama yang digunakan adalah skripsi yang berjudul, “Akses Masyarakat terhadap Sumber Daya Pariwisata dalam Kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,” Pada bagian ketiga, penulis akan membuat refleksi kritis terhadap tinjauan situasi sosial-politik dan relevansi etika politik Peter L. Berger dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Konsep Etika Politik Peter L. Berger

Peter L. Berger lahir di Wien-Austria pada 17 Maret 1929, dibesarkan di Wina dan bermigrasi ke Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Sejak 1981, Berger menjadi Profesor Sosiologi dan Teologi di Universitas Boston. Sejak 1985, Berger menjadi direktur dari Institut Studi Kebudayaan Ekonomi, yang beberapa tahun lalu berubah menjadi Institut Kebudayaan, Agama, dan Masalah Dunia (Daven, 2022). Secara *curriculum vitae*, kehadiran Peter L. Berger memberi suatu pemahaman akan luasnya konsep dunia yang dikaji dari berbagai perspektif termasuk kajian situasi sosial masyarakat dengan abstraksi politik pembangunan. Terhadap latar belakang intelektual ini, Peter L. Berger memampukan suatu kondisi yang menekan pembangunan dimensi kehidupan pada spirit manusia yang menderita dan kurang beruntung.

Peter L. Berger berpandangan bahwa untuk menjadi manusia seutuhnya tentunya membutuhkan

refleksi sekaligus tindakan. Oleh karena itu, menjadi suatu kebodohan apabila makhluk politik yang rasional memutlakkan keterlibatan mana pun tanpa adanya tinjauan imajinasi intelektual-reflektif. Sebaliknya, makhluk politik yang rasional harus bertanya tentang kesesuaian salah satu sikap terhadap aktivitas manusia tertentu (Berger, 1976). Keseimbangan dalam sikap dan aktivitas manusia inilah yang disebut etika politik pembangunan menurut Peter L. Berger.

Secara umum Etika disebut juga moral adalah filsafat, ilmu atau disiplin tentang mode-mode tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia (Hariantati, 2003). Soesono menegaskan bahwa Etika mendasarkan diri pada rasio untuk menentukan kualitas moral kebajikan maka disebut juga sistem filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajibannya (Hariantati, 2003). Pemahaman mengenai etika melampaui suatu kajian prinsip benar-salah dalam sebuah struktur kehidupan sosial masyarakat. Sebab, tinjauan etika ini merangkum banyak dimensi kehidupan manusia, termasuk bidang politik praktis yang menekan kehidupan manusia dan lingkungan yang ditempatinya.

Sejarah lahirnya etika politik Peter L. Berger tak terlepas dari situasi piramida raksasa di Cholula yang menelan banyak korban jiwa akibat kebijakan politik yang dibangun mengatasnamakan kepentingan masyarakat kecil dan miskin tertindas. Situasi perkembangan peradaban politik yang berkembang pada saat itu adalah pemanfaatan masyarakat kecil untuk mendorong timbunnya pundi-pundi kapital elite politik dalam memperkuat kedudukan dalam sistem relasi kekuasaan.

Terdapat dua poin penting etika politik Peter L. Berger (Daven 2022). Pertama, perhitungan penderitaan (*calculus of pain*) merupakan suatu perhitungan penderitaan yang merujuk pada ketidakadilan dan diskriminasi fisik pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pembangunan secara fisik dilihat sebagai kriteria kualitas pembangunan suatu negara. Semakin banyak pembangunan, maka semakin tinggi kualitas pembangunan suatu bangsa itu sendiri. Dalam konteks ini, berbagai penderitaan fisik yang kerap muncul akibat pembangunan seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketidakmerataan pendapatan, penindasan akibat pembangunan. Konsep etika politik dalam bagian ini mengangkat suatu pertimbangan etis akan ciri khas identitas manusia sebagai makhluk rasional dalam lingkungan alam dan sosial.

Kebijakan harus berusaha untuk menghindari timbulnya rasa sakit (Berger, 1976). Rasa sakit yang bertumbuh dalam pembangunan akan menenggelamkan manusia pada suatu perjuangan untuk membebaskan rasa ketidakadilan, penindasan dan kekerasan dari kekuasaan yang mendominasi.

Lebih lanjut kebijakan yang diterapkan tidak melibatkan baik penderitaan aktif atau penerimaan pasif rasa sakit, sebab fakta ini membutuhkan pembenaran moral daripada kebutuhan teknis. Kebutuhan hidup manusia dalam pandangan Berger harus mengakomodasi hak-hak moral manusia yang kurang beruntung dan menjadi korban daripada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material semata-mata. Membaca penderitaan yang berpatokan pada pembangunan fisik, manusia hanya dilihat sebagai objek yang memenuhi kebutuhan para penguasa. Bahwa kekuasaan para elite amat menentukan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan. Hak manusia pun tergeser dalam polarisasi pembangunan yang telah diciptakan oleh para penguasa. Pemikiran seperti inilah yang menarik manusia merenungkannya secara mendalam, sebab hal itu merupakan perhubungan ideologi antara kebijakan dan rasa sakit.

Kedua, perhitungan makna (*calculus of meaning*). Perhitungan makna ini merujuk pada pertimbangan hilangnya makna atau pengetahuan masyarakat atas kearifan lokal, kebudayaan dan peradaban yang mereka miliki. Dengan rumusan lain, setiap kebijakan pembangunan mesti memperhitungkan biaya-biaya manusiawi. Biaya-biaya manusiawi itu tampak dalam penderitaan fisik, seperti kelaparan, penindasan dan kekerasan. Penetapan biaya suatu pembangunan menentukan tolak ukur suatu kesepakatan pembangunan yang akan dijalankan. Dalam konteks pembangunan semacam ini, kepemilikan modal menjadi satu-satunya instrumen pengambilan keputusan bersama. Hal ini tentu mengabaikan spirit pengetahuan yang selalu mempertentangkan makna suatu pembangunan. Penerapan kapitalisme dan sosialisme sebagai panduan pembangunan harus dibayar mahal dengan bencana kelaparan dan teror politik. Manusia adalah korban politik yang diciptakan bukan karena faktor pengetahuan yang berusaha mencari rasionalisasi terhadap setiap kebijakan, melainkan karena kekuatan modal yang menggaungkan segala sesuatu termasuk kesejahteraan bersama suatu komunitas global.

Manusia sebagai makhluk bermoral memiliki hak untuk hidup di dunia yang bermakna. Menghormati hak ini merupakan keharusan moral bagi kebijakan. Kebutuhan akan makna didasarkan pada konstitusi manusia. Manusia adalah hewan yang memproyeksikan makna ke alam semesta. Manusia menamai sesuatu, memberi nilai pada mereka, dan membangun urutan signifikansi yang luas (bahasa, sistem simbol, institusi) yang berfungsi sebagai pedoman bagi keberadaannya.

Kecenderungan manusia untuk memberi makna, meskipun diwakili oleh setiap individu dan kadang-kadang dapat dilakukan dalam kesendirian, pada dasarnya adalah sebuah aktivitas kolektif. Artinya, manusia bersama-sama dalam kelompok terlibat dalam

usaha dari memberi makna pada realitas. Dengan kata lain, makna bukanlah sesuatu yang ditambahkan ke dalam kehidupan sosial yang mungkin diinginkan atau tidak diinginkan seseorang melihat ke dalam, tergantung pada kepentingan tertentu seseorang.

Dalam hal ini, makna lebih dilihat sebagai fenomena sentral kehidupan sosial dan tidak ada aspek yang dapat dipahami tanpa melihat ke dalam pertanyaan tentang apa artinya bagi mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, konsep etika politik Peter L. Berger adalah suatu kajian reflektif yang menilai pembangunan tidak hanya dari segi fisik semata, tetapi juga melihat nilai yang tersembunyi di baliknya, yakni realitas hidup manusia yang mengenal dan memahami dirinya.

Iklim Pembangunan Pariwisata Premium Labuan Bajo; Politik, Sosial-Budaya, dan Ekonomi

Berger menerangkan suatu mentalitas pembangunan dalam suatu kebudayaan masyarakat. Dalam konteks kebudayaan, pembangunan amat era kaitannya dengan tradisi dan kebiasaan yang diciptakan oleh masyarakat. Pembangunan yang kontekstual itu menekankan suatu pembangunan yang melibatkan seluruh proses kebudayaan dalam masyarakat baik dalam konteks lokal maupun internasional. Geertz, salah satu pemikir kebudayaan dan pembangunan manusia menekankan hubungan timbal balik antara aspek kultur dan struktur suatu masyarakat. Kultur adalah jaringan makna yang dengannya manusia menafsirkan pengalaman serta mengarahkan tindakan. Sedangkan struktur sosial adalah bentuk yang diambil oleh tindakan itu, jaringan relasi-relasi sosial yang nyatanya ada (Daven, 2013). Kajian pembangunan melalui suatu kebudayaan yang mentradisi merupakan sejarah realitas kehidupan manusia yang mengidealkan suatu konsep pemahaman yang berakar. Dalam bahasa yang sederhana, kajian budaya dalam kehidupan masyarakat adalah tinggal dan menetap dalam diri dan kebudayaan itu sendiri.

Labuan Bajo sebagai salah satu daerah wisata yang berkembang dan mengalami perubahan sosial secara drastis tumbuh dari suatu kebudayaan yang inklusif. Labuan Bajo, yang dulu tak lebih dari sebuah desa kecil yang sepi dan terisolasi, kini menjelma menjadi kota maju dan modern (Ndau, 2022). Perubahan sosial yang drastis menempatkan Labuan Bajo sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) pada tanggal 2 Agustus 2016. Penempatan sebagai destinasi itu dinilai akan memberikan abstraksi yang cukup kompleks bagi pembangunan yang berkelanjutan, khususnya bagi pembangunan kehidupan masyarakat Labuan Bajo yang mendiami wilayah tersebut. Dalam konteks relasi manusia dan budaya dalam kajian Berger ditemukan

bahwa Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium berakar dalam konteks pembangunan yang diciptakan atas dasar kesepakatan bersama, namun tidak melibatkan nilai-nilai kebudayaan yang telah mentradisi dalam kehidupan masyarakat Labuan Bajo itu sendiri. Bahwa kebudayaan itu terbentuk atas dasar tradisi serta berusaha menciptakan keseimbangan di tengah pengaruh perubahan dunia yang berjalan dinamis.

Fakta itu berbanding terbalik dengan praktik pembangunan yang terjadi sekarang ini. Pasalnya, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menelan hak-hak masyarakat kecil baik secara materi maupun secara non materi. Pembabatan Hutan Bowosie untuk kepentingan investor asing cenderung mematikan aspirasi dan kebebasan masyarakat dalam menolak pembangunan yang telah terjadi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTT menjelaskan fasilitas wisata yang dibangun di kawasan cultural center, hotel, Bajo Gallery, commercial village, dan family hotel resort. Lebih lanjut, kawasan hutan kemudian dikelola oleh Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOP LBF) dengan menggandeng pihak swasta (Rosary, 2024). Secara etis, kebijakan ini sebenarnya dinyatakan sebagai sebuah penindasan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Hal itu disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dengan masyarakat sebagai agen pembangunan yang memegang peranan penting. Bagi Berger, etika politik dipandang sebagai suatu pembangunan yang berangkat dari hak kaum minoritas yang dijunjung sebagai nilai kemanusiaan yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, iklim pembangunan pariwisata melalui jalur destinasi Pulau Komodo adalah suatu keteralienasian sikap tanggung jawab pemerintah terhadap eksistensi masyarakat yang tinggal di sekitar Pulau Komodo. Pemerintah lebih mengedepankan aspek pembangunan tanpa melibatkan hak dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Eksistensi masyarakat Pulau Komodo semakin terdesak karena tuntutan dan kajian imperatif pemerintah untuk kepentingan yang belum memberi kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar Pulau Komodo. Hal ini menimbulkan suatu ketergantungan masyarakat asli terhadap dunia kapitalisme yang dipegang oleh investor asing di Labuan Bajo. Praktisnya, pembangunan pariwisata premium di Labuan Bajo menekan laju pertumbuhan investasi masyarakat lokal, dan sebaliknya perekonomian investor asing semakin nampak dan “menggurui” sistem kehidupan yang lainnya. Merunut pada kajian genealogi kawasan pariwisata super premium, destinasi Pulau Komodo memiliki periodisasi pengelolaan yang berbeda-beda pada setiap rezim (Naufal, 2022). Hal ini sebenarnya terjadi atas desakan relasi kuasa antara pemerintah dengan masyarakat. Semakin sempit

definisi terhadap ruang lingkup Pulau Komodo, maka semakin luas pengaruh dan kekuasaan pemerintah dalam mengelola serta semakin sempit ruang lingkup pergerakan masyarakat lokal di Pulau Komodo.

Pertama, sistem kapitalisme yang mengakar di Labuan Bajo adalah suatu kondisi yang memaksa masyarakat tunduk pada kekuasaan yang datang dari perubahan sosial yang tidak mengakar dalam diri masyarakat lokal. Perubahan sosial yang dimaksud adalah kondisi perubahan nama untuk Pulau Komodo, sampai pada kebijakan yang mengganggu aktivitas harian masyarakat Pulau Komodo. Mata pencaharian masyarakat turut tergeser oleh segala kebijakan pemerintah. Hal ini tentu bermula dari tindakan Pemerintah yang tidak mengakomodasi argumentasi masyarakat dalam menerima atau menolak kajian pembangunan yang ditawarkan oleh dunia luar.

Kedua, kajian pembangunan pariwisata di Labuan Bajo lebih berfokus pada pembangunan fisik. Sebagai contoh, konsep pembangunan di atas lahan hutan Bowosie adalah sebuah kawasan industri yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan bertingkat dan megah. Selain itu, kawasan pesisir pantai yang dipenuhi dengan hotel, *restaurant*, dan *workshop center* (Rosary, 2024). Hal ini tentu berdampak buruk terhadap kajian pembangunan yang menekankan aspek moral dan mempertimbangkan spirit ekologi berkelanjutan. Dalam hal ini, masyarakat lokal adalah “tuan” atas tanah yang melihat kondisi kebudayaan yang strategis dan implikasi yang kompleks terhadap kegiatan perekonomian, pemberdayaan lingkungan sosial-budaya dan kajian komparatif sikap etis dan moral realitas pembangunan pariwisata yang dilakukan.

Relevansi Etika Politik Peter L. Berger bagi Pembangunan Pariwisata Premium di Labuan Bajo

Praktis pembangunan pariwisata premium Labuan Bajo, NTT merunut pada pemikiran etika politik Peter L. Berger adalah suatu tinjauan kritis analitis terhadap perubahan sosial yang drastis. Perubahan sosial dalam konteks ini merujuk pada pereduksian aktivitas konstruktif dan idealisme pembangunan yang mengedepankan moralitas masyarakat setempat (Berger, 1985). Lemahnya pemberdayaan masyarakat karena kepentingan sebagian orang memastikan jalannya pembangunan yang tumpang tindih. Pada satu sisi, konteks pembangunan pariwisata memuat suatu kebudayaan masyarakat yang mengikutinya, sedemikian rupa sehingga penerapan etika politik berlangsung transformasi yang konstruktif. Pada sisi lain, etika politik Peter L. Berger juga kajian nilai mengandung suatu tinjauan praktis yang tidak bertentangan dengan kehidupan masyarakat lokal. Dalam hal ini,

pembangunan berdasarkan etika politik Peter L. Berger mengupayakan penanaman nilai-nilai edukatif, transparan, komunitas pembangunan bagi pemberdayaan masyarakat lokal ke depannya.

Terdapat beberapa poin penting relevansi etika politik Peter L. Berger bagi pembangunan pariwisata premium di Labuan Bajo. Pertama, pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan mesti mengakomodasi argumentasi-argumentasi masyarakat lokal sebelum mengambil keputusan. Dalam hal ini, etika politik Peter L. Berger menekankan adanya suatu pertimbangan reflektif dalam kajian pembangunan pariwisata yang dilakukan. Pemerintah sebagai penyedia jasa pembangunan mesti melakukan kajian analisis yang transparan terhadap segala perubahan dan *damage* yang dihasilkan sementara proses dan sekaligus setelah pembangunan dilakukan. Hal ini dinilai sebagai usaha membangun pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, manusia lokal menjadi sumber kekuasaan yang menentukan hak dan konteks pembangunan yang diinginkan serta dicita-citakan oleh semua orang, tanpa terkecuali.

Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata yang berkembang pesat mesti tetap melihat masyarakat sebagai realitas dirinya sebagai bagian pertimbangan etika pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Penolakan masyarakat lokal terhadap pembabatan hutan Bowosie adalah penempatan diri yang mempertimbangkan relasi personal dan komunal bersama lingkungan, tempat tinggal manusia itu sendiri. Masyarakat lokal mesti memiliki akses dalam menilai kebijakan pembangunan oleh para elite politik. Manusia dalam masyarakat menempati suatu ruang yang bebas dalam pergerakan menentukan pilihan tanpa tekanan dan dorongan dari pihak mana pun, termasuk sistem kapitalisme dari pihak mana pun.

Kedua, masyarakat lokal mengkritisi kebijakan kenaikan tiket masuk Pulau Komodo karena kepentingan yang mengatasnamakan eksploitasi lingkungan yang destruktif. Dalam kajian ini, masyarakat intelektual melihat suatu pembangunan yang dikaji atas dasar kesepakatan kolektif masyarakat. Melihat kajian Peter L. Berger, pembangunan pariwisata mesti berakar dari kepentingan-kepentingan yang berakar dan landasan masyarakat miskin yang terpinggirkan dan kurang mendapat tempat dalam kuasa pembangunan. Dalam konteks ini, keberlangsungan pembangunan mesti juga memperhatikan SDM masyarakat lokal yang terintegritas satu dengan bidang lainnya. Identitas pembangunan pariwisata di Labuan Bajo saat ini adalah pemberdayaan SDM yang terukur. Oleh karena itu, etika politik Peter L. Berger menempatkan kebebasan dan kesadaran kolektif dalam menjaga dan mengembangkan investasi pariwisata Labuan Bajo itu sendiri. Tanpa SDM manusia lokal, cikal bakal

pembangunan dalam konteks yang lebih luas dan terarah dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga, adanya ruang diskursus yang terbuka terhadap dialog politik pembangunan antara masyarakat dan pemerintah. Berger menekankan suatu dialog kolektif akan cara-cara pemberdayaan diri dan realitas pembangunan yang ada. Rakyat bersikap kritis dan cerdas, tetapi seringkali dibungkam dalam logika kapitalisme. Pendasaran ini ditemukan dalam upaya untuk melakukan resistensi terhadap kebijakan yang tidak mendukung rakyat selalu dihalangi oleh berbagai cara, termasuk praktik negosiasi dengan berbagai kepentingan di dalamnya (Solanta, 2017). Pada tahap ini, masyarakat mesti menggunakan kecerdasan intelektual dan refleksi sosial-budaya yang dimiliki untuk menempatkan suatu kondisi hidup masyarakat yang bertumbuh dalam kemampuan akademik secara menyeluruh. Kapasitas pembangunan pariwisata premium di Labuan Bajo mesti mengundang seluruh komponen terlibat di dalamnya, terkhusus masyarakat miskin dan yang tertindas ideologi dan kepentingan kekuasaan. Dalam konteks pembangunan ala Berger, ideologi dan kekuasaan masyarakat lokal tidak terletak pada pengetahuan teoretis semata, tetapi lebih kepada pemahaman praktis yang menyentuh substansi dan realitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pada tahap ini, masyarakat mengambil suatu kajian masyarakat yang mengedepankan asas-asas pembangunan pariwisata Labuan Bajo. Masyarakat lokal sebagai penjaga dan pemelihara hutan Bowosie adalah mereka yang lebih dekat mendengar jeritan alam. Demikian pun, masyarakat lokal yang menempati kawasan Pulau Komodo adalah mereka yang hidup berdampingan menyelamatkan identitas Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang berkembang maju. Oleh karena itu, keterasingan masyarakat karena kepentingan khusus yang dijalankan akan kembali kepada keseimbangan apabila pemerintah dan masyarakat melihat titik kekuasaan dan dialog yang mesti dijalankan secara kolektif.

KESIMPULAN

Situasi pembangunan kolektif pariwisata di Labuan Bajo menempati ruang kesadaran yang total akan eksistensi masyarakat lokal yang mendiami wilayah pembangunan di dalamnya. Kajian relevansi etika politik Peter L. Berger mengundang adanya keterlibatan masyarakat dalam membangun dunia pariwisata sekaligus mengkritisi alur kebijakan pemerintah dan kaum elite politik yang menggunakan kepentingan pribadinya secara sepihak.

Aktualitas pembangunan kolektif suatu wilayah mesti menempatkan daya kritis dan aktivitas tindakan yang tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia yang amat kontekstual. Rangsangan kepekaan etis dalam politik

pembangunan Peter L. Berger dimaksudkan agar masyarakat lokal sama sekali tidak melupakan identitas pembangunan yang selalu berjalan dalam sejarah dan realitas yang menempati dirinya. Oleh karena itu, undangan etika politik Peter L. Berger seharusnya membentuk suatu pemahaman yang rasional dan kajian obyektif berdasarkan nilai-nilai pembangunan dengan idealisme hidup masyarakat yang konstruktif dan transparansi.

REFERENSI

- Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)" *Jurnal Analisis Isi*. Jakarta: 2018.
- Berger, Peter L. *Invitation to Sociology, A Humanistic Perspective*, terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Penerbit Inti Sarana Aksara. 1985.
- Berger, Peter L. *Pyramids of Sacrifice Political Ethics and Social Change*. New York: Anchor Press, 1976.
- Daven, Mathias. "Agama dan Politik – Hubungan yang Ambivalen Dialog Versus "Benturan Peradaban?" *Jurnal Ledalero* Vol. 12: 2. Desember, 2013.
- Daven, Mathias. "Politik Pembangunan dalam Pandangan Peter Ludwig Berger", Materi Kuliah Pilihan di IFTK Ledalero, Juni-Desember 2022.
- Hariantati, Runi. "Etika Politik dalam Negara Demokrasi", *Jurnal Demokrasi* Vol.II No.1 Th. 2003.
- Hasibuan, Sarah Nita. "Polemik Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Papua." *Jurnal Indonesia Maju* Vol. 1. No. 1. Agustus 2021.
- Herin, Fransiskus Pati. "Pertaruhan Citra Labuan Bajo", *Kompas.id* 2 Agustus 2022, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/01/pertaruhan-citra-labuan-bajo>, diakses pada 4 Desember 2022.
- Naufal, Muhammad Iqbal. "Akses Masyarakat terhadap Sumber Daya Pariwisata dalam Kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat." Skripsi Sarjana, Progam Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Surabaya. 2020.
- Ndau, Romanus. "Menyelamatkan Pariwisata Labuan Bajo". *Kompas.id* 1 Agustus 2022. https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/28/menyelamatkan-pariwisata-labuan-bajo?utm_source=kompasid&utm_medium=link_shared&utm_content=copy_link&utm_campaign=sharinglink.
- Renwarin, Bernardus. "Pembangunan: antara Mitos dan Rasionalitas" *Jurnal Agama dan Kebudayaan*. Vol. 3:1. Jayapura, 2006.
- Rosary, Ebed de. "Alih Fungsi Hutan Bowosie jadi Pariwisata Labuan Bajo Ditentang Banyak Pihak. Bagaimana Dampaknya?" dalam *Mongabay* 2021 <https://www.mongabay.co.id/2021/04/21/alih-fungsi-hutan-bowosie-jadi-pariwisata-labuan-bajo-ditentang-banyak-pihak-bagaimana-dampaknya/>, diakses pada 19 Oktober 2024.
- Solanta, Epifanus. *Dialektika Ruang Publik dan Pertarungan Gagasan*. Yogyakarta: Beta Offset, 2017.